

MEMO HUKUM

SRI WIJAYANTO S

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH TABUNGAN DAN DEPOSITO



ICK .
Per. 2207/96
Sri
p

MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1996

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH TABUNGAN DAN DEPOSITO



MEMO HUKUM

Diajukan Sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Pembimbing,

DJASADIN SARAGIH, S.H., LL. M.,
NIP. 130445322

Penyusun,

SRI WIJAYANTO S
NIM. 039213520

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Kedudukan nasabah tabungan dan deposito menurut asas kebebasan berkontrak dalam hubungan antara bank dan nasabah sangat lemah. Kebebasan berkontrak dalam hubungan antara bank dan nasabah hanya dimiliki oleh pihak bank, terutama dalam pembentukan isi perjanjian baku yang dituangkan dalam formulir tabungan dan deposito. Lemahnya kedudukan nasabah tabungan dan deposito dalam hubungan antara bank dan nasabah juga ditunjukkan dari kurang dijaminnya hak-hak nasabah oleh pihak bank. Hak-hak nasabah diwujudkan dalam bentuk kewajiban berupa prestasi yang harus dipenuhi oleh pihak bank, yaitu prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian pada saat pembukaan rekening tabungan dan deposito. Dalam prakteknya hak-hak tersebut masih kurang dijamin, terbukti dari masih banyaknya pengaduan nasabah bank atas ketidakpuasannya terhadap pelayanan bank yang cenderung kurang menghargai kepentingan nasabahnya.
2. Agar kedudukan nasabah tabungan dan deposito tidak berada pada posisi yang lemah sebagaimana ditentukan dalam formulir perjanjian baku, maka klausul yang memberatkan pihak nasabah (klausul eksepsi) perlu dihilangkan. Sebab selain memberatkan pihak nasabah, juga

merupakan penyimpangan asas kebebasan berkontrak. Jika dikaitkan dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 BW). Upaya ini memerlukan peranan Bank Indonesia sesuai dengan tugasnya sebagai badan pembina dan pengawas bank yang beroperasi di Indonesia. Peranan Bank Indonesia dapat berupa pengaturan isi perjanjian baku, pemberian pelayanan atas pengaduan nasabah dan menerapkan pelaksanaan peraturan-peraturan umum yang secara formal telah memberikan perlindungan hukum bagi nasabah.

SARAN

1. Perlu adanya pemberian kebebasan bagi nasabah tabungan dan deposito untuk mempelajari dan memahami ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam formulir perjanjian baku yang ditawarkan pihak bank dalam setiap pembukaan rekening tabungan atau deposito. Dalam hal ini diharapkan pula dari pihak bank untuk memberikan penjelasan kepada calon nasabahnya mengenai setiap klausul dalam formulir perjanjian baku.
2. Bank Indonesia perlu segera mengeluarkan ketentuan yang mengatur isi dan berlakunya perjanjian baku bagi tabungan dan deposito agar kedudukan hukum antara bank dan nasabah seimbang. Ada baiknya jika perlindungan hukum bagi nasabah tabungan dan deposito dalam bentuk